



**PEMIMPIN TRANSGRESIF DAN DUKUNGAN PUBLIK:  
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN PSIKOLOGI SOSIAL  
TERHADAP PELANGGARAN NORMA DALAM  
KEPEMIMPINAN**

Kuntum Chairum Ummah  
Faculty of Social and Cultural Sciences, Trunodjoyo University of Madura  
[kuntum.ummah@trunojoyo.ac.id](mailto:kuntum.ummah@trunojoyo.ac.id)

Rifqi  
Faculty of Islamic Studies, University of Darul Ma'arif, Indramayu  
[riefq816@gmail.com](mailto:riefq816@gmail.com)

Risky Nuri Amelia  
Faculty of Teacher Training and Education, Khairun University, Ternate  
[riskynuri.amelia@unkhair.ac.id](mailto:riskynuri.amelia@unkhair.ac.id)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: June 2026  
Accepted: July 2026

Revised : August 2026  
Available online : September 2026

**How to Cite:** Chairum Ummah, K., Rifqi, R., & Risky Nuri Amelia. *Transgressive Leadership and Public Support: A Socio-Legal and Social Psychological Analysis of Norm Violations in Leadership*. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 2(3), 105–118. <https://doi.org/10.61166/ld.v2i3.51>

**ABSTRACT**

This article aims to analyze the sociology of law and psychological mechanisms underlying the appeal of transgressive leaders, namely leaders who violate norms of fairness, honesty, and propriety but may nevertheless gain public support under certain conditions. It also identifies conceptual implications for addressing such appeal. This study employs a library research method using a descriptive qualitative approach, content analysis, and narrative synthesis of literature in social and political psychology. The primary conceptual source is Van Kleef's (2025)

framework, supplemented by empirical studies on moral judgment, norm violations, power perception, dominance, conflict, threat, and leadership. The findings indicate that the appeal of transgressive leaders can be understood through three interrelated mechanisms. First, moral judgment is contextual and influenced by group identity, interests, and the goals of observers. Second, norm violations can, under certain conditions, be perceived as signals of power and dominance, particularly when such violations are perceived to benefit a particular group. Third, perceptions of threat and conflict can increase preferences for dominant leaders. Based on these mechanisms, moral condemnation alone has limitations in addressing the appeal of transgressive leaders. Conceptually, relevant approaches include evaluating claims of benefits based on evidence, critically examining threat narratives, and distinguishing leadership firmness from norm violations. This study highlights the importance of understanding support for transgressive leaders as the result of an interaction between morality, interests, perceptions of power, and threat contexts, rather than simply as a reflection of low public moral awareness.

**KEY WORDS:** *transgressive leaders, moral judgment, norm violations, dominance, political psychology.*

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis mekanisme sosiologi hukum dan psikologis yang menjelaskan daya tarik pemimpin transgresif, yaitu pemimpin yang melakukan pelanggaran terhadap norma keadilan, kejujuran, dan kepatutan, tetapi dalam kondisi tertentu tetap memperoleh dukungan publik. Kajian ini juga mengidentifikasi implikasi konseptual yang dapat digunakan untuk menghadapi daya tarik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis isi, dan sintesis naratif terhadap literatur psikologi sosial dan psikologi politik. Sumber utama kajian adalah kerangka konseptual Van Kleef (2025) yang diperkaya dengan berbagai penelitian empiris mengenai penilaian moral, pelanggaran norma, persepsi kekuasaan, dominasi, konflik, ancaman, dan kepemimpinan. Hasil kajian menunjukkan bahwa daya tarik pemimpin transgresif dapat dipahami melalui tiga mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, penilaian moral bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh identitas kelompok, kepentingan, serta tujuan pengamat. Kedua, pelanggaran norma dalam kondisi tertentu dapat dipersepsikan sebagai sinyal kekuasaan dan dominasi, terutama ketika tindakan tersebut dianggap memberikan manfaat bagi kelompok tertentu. Ketiga, persepsi terhadap ancaman dan konflik dapat meningkatkan preferensi terhadap pemimpin yang dominan. Berdasarkan mekanisme tersebut, kecaman moral semata memiliki keterbatasan dalam menghadapi daya tarik pemimpin transgresif. Secara konseptual, pendekatan yang dapat dipertimbangkan mencakup pengujian klaim manfaat berdasarkan bukti, pemeriksaan kritis terhadap narasi ancaman, serta pembedaan antara ketegasan kepemimpinan dan pelanggaran norma. Kajian ini menegaskan pentingnya memahami dukungan terhadap pemimpin transgresif sebagai hasil interaksi antara moralitas, kepentingan, persepsi kekuasaan, dan konteks ancaman, bukan semata-mata sebagai persoalan rendahnya kesadaran moral masyarakat.

**KATA KUNCI:** *pemimpin transgresif, penilaian moral, pelanggaran norma, dominasi, psikologi politik*

## INTRODUCTION

Fenomena transgressive leadership merujuk pada bentuk kepemimpinan yang melibatkan pelanggaran terhadap norma sosial, moral, atau hukum yang berlaku dalam suatu kelompok. Pelanggaran tersebut tidak selalu menimbulkan penolakan dari masyarakat. Dalam kondisi tertentu, perilaku yang menyimpang dari norma justru dapat dipersepsikan sebagai tanda keberanian, kekuasaan, dominasi, atau kemampuan pemimpin untuk bertindak tegas. Tingkat legitimasi pemimpin turut memengaruhi respons pengikut terhadap pelanggaran tersebut, karena

pemimpin yang dipandang legitimate cenderung memperoleh toleransi yang lebih besar terhadap tindakannya.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *living law* Eugen Ehrlich yang menekankan bahwa keberlakuan hukum dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh penerimaan dan praktik sosial. Dalam konteks kepemimpinan transgresif, suatu tindakan yang secara formal dianggap melanggar aturan belum tentu diperlakukan sebagai pelanggaran oleh masyarakat. Van Kleef (2025) menjelaskan bahwa daya tarik pemimpin transgresif dapat muncul ketika pelanggaran norma dipersepsikan memberikan manfaat tertentu. Oleh sebab itu, tindakan yang menyimpang tidak selalu dipahami sebagai kelemahan moral, tetapi dapat ditafsirkan sebagai indikator keberanian, kekuasaan, dominasi, atau kebebasan bertindak.

Respons masyarakat terhadap pelanggaran norma juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan kepentingan pengamat. Popa, Phillips, dan Robertson (2014) menunjukkan bahwa respons terhadap pelanggaran norma tidak selalu negatif. Dari 246 laporan mengenai pelanggaran norma sosial yang dianalisis, sekitar 17 persen menunjukkan respons positif dan 26 persen menunjukkan respons yang sekaligus positif dan negatif. Respons tersebut antara lain dipengaruhi oleh pentingnya norma yang dilanggar, konteks tindakan, serta manfaat yang diperoleh pengamat. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelanggaran bersifat kontekstual dan tidak dapat dipahami hanya melalui asumsi bahwa setiap penyimpangan akan memperoleh sanksi sosial.

Fleksibilitas penilaian moral juga berkaitan dengan nilai, tujuan, dan kepentingan individu. Graham, Haidt, dan Nosek (2009) menunjukkan bahwa individu maupun kelompok dapat memberikan penekanan yang berbeda terhadap fondasi moral seperti kepedulian, keadilan, loyalitas, otoritas, dan kesucian. Sementara itu, Bocian dan Wojciszke (2014) menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelanggaran dapat menjadi lebih lunak ketika pengamat memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Melnikoff dan Bailey (2018) juga menunjukkan bahwa preferensi terhadap karakter moral seseorang dapat berubah sesuai dengan tujuan yang sedang dijalankan. Dengan demikian, penilaian moral terhadap pemimpin tidak sepenuhnya bersifat tetap, melainkan dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan konteks pengamat.

Selain faktor moral, pelanggaran norma dapat memengaruhi persepsi terhadap kekuasaan. Van Kleef dan kolega (2011) menemukan bahwa individu yang melanggar aturan dapat dipersepsikan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan individu yang mematuhi aturan. Pelanggaran dapat menjadi sinyal bahwa seseorang memiliki keleluasaan untuk bertindak sesuai kehendaknya meskipun terdapat aturan atau tekanan situasional. Efek tersebut dapat semakin kuat apabila pelanggaran dipersepsikan memberikan manfaat kepada pihak lain. Van Kleef dan kolega (2012) menemukan bahwa pelanggaran norma yang bersifat prososial dapat meningkatkan pemberian kekuasaan kepada pelakunya. Dengan demikian, makna sosial dari pelanggaran sangat bergantung pada konteks serta konsekuensi yang ditimbulkannya.

Mekanisme lainnya berkaitan dengan kondisi konflik, ancaman, dan ketidakpastian. Dalam situasi yang dipersepsikan penuh konflik, preferensi terhadap pemimpin yang dominan dapat meningkat karena karakter dominasi dianggap relevan untuk menghadapi ancaman dan persaingan. Laustsen dan Petersen (2017) menunjukkan hubungan antara persepsi konflik dan preferensi terhadap pemimpin dominan, sementara penelitian Laustsen dan kolega (2025) yang melibatkan 5.008 partisipan dari 25 negara menemukan bahwa persepsi terhadap konflik antarkelompok berkaitan dengan meningkatnya preferensi terhadap kepemimpinan yang dominan.

Ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa daya tarik pemimpin transgresif tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan apakah perilaku pemimpin sesuai atau bertentangan dengan norma. Daya tarik tersebut terbentuk melalui interaksi antara penilaian moral yang kontekstual, persepsi terhadap kekuasaan dan dominasi, kepentingan pengamat, serta kondisi sosial-politik yang dihadapi masyarakat. Dalam situasi tertentu, pelanggaran norma bahkan dapat dibingkai sebagai keberanian, ketegasan, atau cara untuk menghadapi ancaman dan menyelesaikan persoalan yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui prosedur biasa.

Implikasinya, upaya memahami atau merespons pemimpin transgresif tidak cukup hanya dengan menunjukkan bahwa tindakan mereka melanggar norma. Perlu diperhatikan pula klaim mengenai manfaat yang dihasilkan oleh tindakan tersebut serta narasi ancaman yang dapat memperkuat daya tarik kepemimpinan dominan. Karena itu, analisis terhadap pemimpin transgresif perlu mempertimbangkan konsekuensi nyata dari tindakannya dan bagaimana tindakan tersebut dipersepsikan oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, literatur tersebut menunjukkan perlunya sintesis antara perspektif psikologi sosial, psikologi politik, dan sosiologi hukum untuk menjelaskan penerimaan masyarakat terhadap pemimpin yang melanggar norma. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini penting karena kajian mengenai kepemimpinan dan perilaku politik tidak hanya perlu melihat aspek normatif, tetapi juga mekanisme psikologis yang memengaruhi bagaimana masyarakat menilai, menerima, atau memberikan legitimasi terhadap perilaku pemimpin.

## RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data yang berasal dari berbagai literatur akademik yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Metode ini digunakan untuk menelusuri, mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai konsep serta temuan penelitian yang berkaitan dengan daya tarik pemimpin transgresif (Zed, 2008). Dengan demikian, penelitian tidak menggunakan data primer melalui observasi atau wawancara, melainkan menganalisis data sekunder yang telah tersedia dalam publikasi ilmiah.

Pendekatan yang digunakan adalah **deskriptif-kualitatif** dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan sintesis naratif (*narrative synthesis*). Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan konsep, argumentasi, serta temuan yang relevan dari berbagai sumber. Selanjutnya, sintesis naratif digunakan untuk mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam kerangka argumentasi yang menjelaskan mekanisme psikologis di balik daya tarik pemimpin transgresif.

Sumber utama penelitian adalah artikel Van Kleef (2025), "*Understanding (and Counteracting) the Appeal of Transgressive Leaders*", yang diterbitkan dalam *Trends in Cognitive Sciences*. Artikel tersebut digunakan sebagai landasan konseptual karena secara khusus membahas mekanisme psikologis yang berkaitan dengan daya tarik pemimpin transgresif dan pendekatan untuk mengurangi daya tarik tersebut. Sementara itu, sumber pendukung berupa berbagai artikel ilmiah yang membahas penilaian moral, pelanggaran norma, persepsi kekuasaan dan dominasi, kepemimpinan, konflik antarkelompok, ancaman sosial, serta preferensi terhadap pemimpin dominan. Literatur yang relevan ditelusuri berdasarkan kata kunci seperti *transgressive leaders*, *norm violations*, *moral judgment*, *power perception*, *dominance*, *dominant leadership*, *intergroup conflict*, dan *threat perception*. Sumber berbahasa Indonesia juga digunakan untuk memperkuat relevansi pembahasan dengan konteks sosial-politik Indonesia.

Pemilihan literatur dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan relevansi sumber terhadap fokus penelitian, kredibilitas akademik, keterkaitan dengan kerangka konseptual Van Kleef (2025), serta kontribusinya dalam menjelaskan mekanisme psikologis yang menjadi fokus kajian. Literatur yang hanya membahas kepemimpinan secara umum tanpa keterkaitan dengan pelanggaran norma, penilaian moral, persepsi kekuasaan, dominasi, konflik, atau ancaman tidak diprioritaskan dalam analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui **teknik dokumentasi**, yang meliputi penelusuran literatur, pembacaan kritis, pencatatan informasi yang relevan, serta pengelompokan temuan berdasarkan tema penelitian. Informasi yang dikumpulkan mencakup konsep teoretis, temuan empiris, konteks penelitian, serta implikasi yang berkaitan dengan daya tarik pemimpin transgresif. Selanjutnya, berbagai sumber dibandingkan untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan perspektif, dan hubungan antarkonsep.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, **reduksi data**, yaitu menyeleksi informasi yang relevan dan mengelompokkannya ke dalam tiga mekanisme utama: fleksibilitas penilaian moral; hubungan antara pelanggaran norma dengan persepsi kekuasaan atau dominasi; serta meningkatnya preferensi terhadap pemimpin dominan dalam kondisi konflik, ancaman, dan ketidakpastian. Kedua, **penyajian data**, yaitu menyusun temuan secara tematik dengan membandingkan hasil penelitian dari berbagai sumber dan memperhatikan konteks serta hubungan antarkonsep. Ketiga, **sintesis naratif**, yaitu mengintegrasikan seluruh temuan untuk menjelaskan bagaimana pelanggaran norma dapat dipersepsikan secara berbeda dan, dalam kondisi tertentu, dapat berkaitan dengan persepsi mengenai kekuasaan, keberanian, dominasi, atau kemampuan kepemimpinan.

Tahap terakhir adalah **penarikan simpulan** berdasarkan hasil sintesis seluruh literatur. Simpulan diarahkan untuk menjelaskan mekanisme psikologis yang mendasari daya tarik pemimpin transgresif serta implikasi konseptual yang dapat dipertimbangkan dalam menghadapi fenomena tersebut. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan tidak melakukan pengujian empiris terhadap strategi tertentu, implikasi strategis yang dihasilkan diposisikan sebagai proposisi konseptual berdasarkan sintesis literatur, bukan sebagai bukti empiris mengenai efektivitas suatu strategi.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Paradoks Dukungan terhadap Pemimpin Transgresif

Respons masyarakat terhadap pelanggaran norma tidak selalu negatif. Kajian Popa, Phillips, dan Robertson (2014) terhadap 246 laporan menunjukkan bahwa sekitar 17% respons terhadap pelanggaran norma bersifat positif, sedangkan 26% lainnya bercampur antara positif dan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran norma dalam kondisi tertentu dapat diterima atau setidaknya tidak selalu menimbulkan kecemasan sosial.

Dalam konteks kepemimpinan, penilaian terhadap pelanggaran tidak hanya bergantung pada tindakan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana tindakan tersebut ditafsirkan. Pelanggaran dapat dipandang berbeda berdasarkan kepentingan kelompok, identitas politik, persepsi terhadap kekuasaan, serta situasi yang dianggap mengancam. Dalam kondisi tertentu, tindakan yang melampaui norma bahkan dapat dipersepsikan sebagai keberanian, ketegasan, atau kemampuan bertindak secara bebas.

Paradoks ini muncul karena kepemimpinan idealnya dikaitkan dengan kejujuran, keadilan, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab publik. Namun, pelanggaran norma tidak selalu mengurangi daya tarik seorang pemimpin. Menurut Van Kleef (2025), daya tarik pemimpin transgresif dapat muncul ketika pelanggaran dipersepsikan memberikan manfaat atau menjadi sinyal kekuasaan dan dominasi.

Terdapat tiga mekanisme utama yang menjelaskan fenomena tersebut:

#### 1) Fleksibilitas penilaian moral

Individu dapat menilai pelanggaran secara kontekstual berdasarkan nilai, identitas, kepentingan, dan tujuan yang sedang dihadapi.

#### 2) Pelanggaran norma sebagai sinyal kekuasaan dan dominasi

Dalam situasi tertentu, keberanian melanggar aturan dapat dipersepsikan sebagai tanda kekuatan, keberanian, dan kemampuan untuk bertindak tanpa mudah dibatasi.

#### 3) Ancaman, konflik, dan ketidakpastian

Ketika menghadapi ancaman atau konflik, individu dapat lebih membutuhkan pemimpin yang dipersepsikan tegas, dominan, dan mampu mengendalikan keadaan.

Ketiga mekanisme tersebut saling berinteraksi. Fleksibilitas moral menentukan apakah pelanggaran dianggap dapat diterima, persepsi kekuasaan dapat mengubah makna pelanggaran menjadi tanda dominasi, sedangkan kondisi ancaman dapat meningkatkan kebutuhan terhadap figur yang dianggap mampu bertindak tegas.

Dengan demikian, dukungan terhadap pemimpin transgresif tidak semata-mata menunjukkan bahwa masyarakat mengabaikan moralitas. Dukungan dapat terbentuk ketika suatu pelanggaran ditafsirkan sesuai dengan kepentingan kelompok, dianggap menghasilkan manfaat, menjadi simbol kekuasaan, atau dipandang relevan untuk menghadapi ancaman dan ketidakpastian. Karena itu, kecaman moral saja belum tentu cukup untuk mengubah persepsi pendukung terhadap pemimpin transgresif.

Ketiga mekanisme tersebut tidak bekerja secara terpisah. Fleksibilitas penilaian moral dapat menentukan apakah suatu pelanggaran dipandang sebagai sesuatu yang dapat diterima atau justru tercela. Persepsi mengenai kekuasaan dapat membuat pelanggaran tertentu dipahami sebagai tanda dominasi dan keberanian. Sementara itu, kondisi ancaman dan konflik dapat meningkatkan kebutuhan psikologis terhadap figur yang dipersepsikan mampu bertindak tegas dan mengendalikan situasi. Interaksi ketiganya membantu menjelaskan mengapa pelanggaran norma yang dilakukan seorang pemimpin dalam kondisi tertentu tidak selalu menjadi hambatan bagi munculnya dukungan.

Dengan demikian, paradoks dukungan terhadap pemimpin transgresif tidak dapat dijelaskan hanya dengan menganggap bahwa masyarakat tidak memahami atau tidak peduli terhadap pelanggaran moral. Dukungan tersebut dapat terbentuk melalui proses interpretasi yang membuat tindakan transgresif memperoleh makna tertentu bagi pengamat. Pemimpin yang melanggar norma dapat tetap memperoleh dukungan ketika pelanggaran tersebut dipandang sejalan dengan kepentingan kelompok, menghasilkan manfaat yang dianggap nyata, menjadi simbol kekuasaan, atau dianggap relevan untuk menghadapi situasi yang dipersepsikan penuh ancaman dan ketidakpastian. Pemahaman terhadap mekanisme inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana daya tarik pemimpin transgresif terbentuk dan mengapa kecaman moral semata tidak selalu mengubah persepsi pendukungnya.

### **Elastisitas Penilaian Moral**

Penilaian moral manusia tidak bersifat mutlak dan seragam, tetapi dapat berubah sesuai dengan orientasi nilai, kepentingan, dan tujuan situasional. Graham, Haidt, dan Nosek (2009) melalui *moral foundations theory* menjelaskan bahwa penilaian moral didasarkan pada beberapa fondasi, yaitu kepedulian, keadilan, loyalitas, otoritas, dan kesucian. Perbedaan orientasi nilai menyebabkan individu memberikan penekanan yang berbeda terhadap fondasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penilaian moral tidak secara otomatis mencerminkan perbedaan tingkat moralitas, melainkan perbedaan kerangka nilai yang digunakan dalam menilai suatu tindakan.

Selain orientasi nilai, kepentingan juga dapat memengaruhi penilaian moral. Bocian dan Wojciszke (2014) menunjukkan bahwa individu yang memperoleh keuntungan dari perilaku tidak etis orang lain cenderung memberikan penilaian yang lebih lunak terhadap pelaku. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat yang diterima pengamat dapat memengaruhi evaluasi terhadap tindakan yang secara normatif bermasalah. Dalam konteks kepemimpinan, hal tersebut membantu menjelaskan mengapa sebagian pendukung dapat mentoleransi pelanggaran norma ketika tindakan pemimpin dipersepsikan memberikan manfaat bagi dirinya atau kelompoknya.

Penilaian moral juga dipengaruhi oleh tujuan situasional. Melnikoff dan Bailey (2018) menemukan bahwa preferensi terhadap karakter moral tertentu dapat berubah sesuai dengan peran dan tujuan yang sedang dijalankan. Misalnya, individu yang berperan sebagai pengacara pembela lebih menyukai anggota juri yang pemaaf, sedangkan jaksa lebih menyukai juri yang cenderung tidak kenal ampun. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakter moral tidak selalu dinilai secara mutlak, tetapi berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan tertentu.

Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelanggaran norma bersifat kontekstual. Orientasi nilai menentukan aspek moral yang lebih ditekankan, kepentingan dapat memengaruhi toleransi terhadap pelanggaran, sedangkan tujuan situasional menentukan karakteristik yang dianggap sesuai dengan kebutuhan pengamat. Dalam konteks pemimpin

transgresif, kondisi ini memungkinkan suatu pelanggaran norma ditoleransi atau bahkan dinilai positif oleh sebagian masyarakat.

Dengan demikian, dukungan terhadap pemimpin transgresif tidak selalu berarti bahwa pendukung menganggap pelanggaran tersebut benar secara universal. Dukungan dapat muncul karena tindakan pemimpin ditafsirkan melalui kerangka nilai, kepentingan, dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, analisis terhadap pemimpin transgresif perlu memperhatikan bukan hanya apakah suatu tindakan melanggar norma, tetapi juga bagaimana norma tersebut dipahami, kepentingan yang terlibat, serta tujuan yang mendasari penilaian terhadap tindakan tersebut.

### **Pelanggaran Norma sebagai Sinyal Kekuasaan dan Dominasi**

Pelanggaran norma tidak selalu dipersepsikan sebagai indikasi karakter buruk, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berfungsi sebagai sinyal kekuasaan dan dominasi. Van Kleef et al. (2011) menunjukkan melalui empat eksperimen bahwa individu yang melakukan berbagai bentuk pelanggaran norma cenderung dipersepsikan lebih berkuasa dibandingkan individu yang mematuhi norma. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengabaikan aturan dapat ditafsirkan sebagai indikasi keleluasaan bertindak, keberanian menghadapi konsekuensi, dan kapasitas untuk bertindak secara mandiri.

Makna positif dari pelanggaran norma dapat semakin kuat ketika tindakan tersebut dipersepsikan memberikan manfaat kepada orang lain atau kelompok. Dalam konteks kepemimpinan, pelanggaran aturan dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan manfaat bagi kelompok pendukung. Namun, efek tersebut tidak bersifat otomatis karena bergantung pada jenis norma yang dilanggar serta bagaimana konsekuensi tindakan tersebut dipersepsikan.

Persepsi terhadap pelanggaran norma juga dipengaruhi oleh posisi sosial dan hierarki. Stamkou et al. (2016), melalui 14 studi terhadap 1.704 partisipan, menunjukkan bahwa posisi individu dalam hierarki sosial memengaruhi kecenderungan memberikan kekuasaan kepada pelanggaran norma. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran norma dapat dipandang berbeda berdasarkan kepentingan individu dalam mempertahankan atau mengubah struktur sosial yang ada.

Selain itu, konteks budaya turut menentukan makna sosial pelanggaran. Stamkou et al. (2019), berdasarkan penelitian terhadap 2.369 partisipan dari 19 negara, menemukan bahwa kolektivisme, individualisme, dan keketatan norma sosial berkaitan dengan perbedaan persepsi terhadap pelanggaran norma. Dalam konteks yang lebih ketat secara normatif, preferensi terhadap pemimpin yang mematuhi norma cenderung lebih kuat. Dengan demikian, respons terhadap pelanggaran tidak dapat dilepaskan dari nilai dan norma yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial.

Penelitian Van Kleef et al. (2023) memperjelas bahwa pelanggaran norma lebih berkaitan dengan persepsi dominasi, sedangkan kepatuhan norma lebih berkaitan dengan prestise. Dominasi dan prestise merupakan bentuk status sosial yang dapat memengaruhi pemberian pengaruh melalui mekanisme yang berbeda. Pelanggaran terhadap norma yang lebih luas juga dapat memperoleh makna positif apabila pelaku tetap dianggap mematuhi norma kelompoknya sendiri. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan atau pembelaan terhadap kelompok sehingga meningkatkan dukungan terhadap kepemimpinan.

Dengan demikian, hubungan antara pelanggaran norma dan kekuasaan tidak bersifat universal. Persepsi pengamat dipengaruhi oleh posisi sosial, budaya, jenis norma yang dilanggar, serta manfaat atau kerugian yang dipersepsikan. Pelanggaran dapat meningkatkan persepsi dominasi ketika dipahami sebagai keberanian, kapasitas bertindak, atau bentuk pembelaan terhadap kelompok. Sebaliknya, pelanggaran yang dianggap merugikan kelompok atau mengancam norma yang dianggap penting dapat menghasilkan penolakan.

Dalam konteks pemimpin transgresif, mekanisme ini menjelaskan mengapa pelanggaran

aturan tidak selalu mengurangi daya tarik kepemimpinan. Ketika suatu pelanggaran dipersepsikan sebagai tanda kekuasaan, keberanian, atau keberpihakan terhadap kelompok, tindakan tersebut dapat menjadi sumber pengaruh dan legitimasi psikologis. Namun, daya tarik tersebut bergantung pada kondisi dan interpretasi pengamat. Oleh karena itu, pertanyaan penting bukan apakah pelanggaran norma selalu meningkatkan kekuasaan, melainkan dalam kondisi apa pelanggaran tersebut ditafsirkan sebagai tanda dominasi dan kemudian menghasilkan pengaruh.

Mekanisme ini melengkapi penjelasan mengenai elastisitas penilaian moral. Suatu tindakan dapat tetap dikenali sebagai pelanggaran norma, tetapi pada saat yang sama dipersepsikan sebagai sinyal kekuasaan. Efek tersebut menjadi semakin relevan ketika masyarakat menghadapi ancaman, konflik, dan ketidakpastian, karena kondisi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan terhadap figur yang dipersepsikan dominan.

### **Ancaman, Konflik, dan Preferensi terhadap Kepemimpinan Dominan**

Preferensi terhadap pemimpin dominan tidak hanya dipengaruhi oleh karakter pemimpin, tetapi juga oleh kondisi sosial yang dihadapi kelompok, terutama ketika terdapat konflik, ancaman, dan ketidakpastian. Dalam situasi tersebut, karakter seperti ketegasan, kekuatan, dan dominasi dapat dipersepsikan lebih relevan karena dianggap mampu menghadapi persaingan atau ancaman antarkelompok.

Laustsen dan Petersen (2017) menunjukkan bahwa konflik dapat meningkatkan preferensi terhadap pemimpin yang dominan. Berdasarkan eksperimen, pengukuran perilaku, dan survei terhadap 2.009 responden di Polandia dan Ukraina pada masa krisis Krimea, ditemukan bahwa pemimpin dominan lebih disukai ketika dianggap memiliki kemampuan menghadapi konflik dan memberikan respons yang tegas. Temuan ini menunjukkan bahwa dominasi dapat dipandang bukan hanya sebagai sifat pribadi, tetapi sebagai kapasitas yang dianggap sesuai dengan kebutuhan kelompok dalam situasi tertentu.

Temuan tersebut diperkuat oleh Petersen dan Laustsen (2020), yang menunjukkan bahwa preferensi terhadap dominasi dalam kepemimpinan berkaitan dengan kebutuhan menghadapi konflik antarkelompok. Bukti lintas budaya dari Laustsen et al. (2025), yang melibatkan 5.008 partisipan dari 25 negara, juga menunjukkan adanya hubungan antara meningkatnya persepsi konflik antarkelompok dan meningkatnya preferensi terhadap pemimpin dominan. Namun, hubungan tersebut tetap perlu dipahami dengan mempertimbangkan karakteristik sampel dan konteks sosial masing-masing penelitian.

Ancaman juga dapat berasal dari dalam kelompok. Bøggild dan Laustsen (2016) menemukan bahwa risiko seperti free-riding dan perilaku kriminal dari anggota kelompok dapat meningkatkan preferensi terhadap pemimpin dominan. Sebaliknya, apabila risiko utama justru berasal dari pemimpin sendiri, khususnya melalui perilaku yang tidak responsif atau mementingkan diri sendiri, preferensi terhadap dominasi dapat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa respons terhadap kepemimpinan dominan bergantung pada jenis risiko yang dipersepsikan.

Stenner (2005) melalui konsep authoritarian dynamic memberikan perspektif tambahan bahwa respons otoritarian dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama ketika terdapat normative threat atau ancaman terhadap tatanan nilai dan norma yang dianggap penting. Ancaman dalam konteks ini tidak hanya berupa bahaya fisik atau ekonomi, tetapi juga dapat berupa persepsi bahwa tatanan sosial, nilai, dan batas mengenai benar dan salah sedang mengalami gangguan. Kondisi seperti konflik sosial yang tajam dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi juga dapat menjadi bagian dari lingkungan yang memperkuat respons tersebut.

Dalam konteks pemimpin transgresif, situasi ancaman dan konflik dapat membuat tindakan yang pada kondisi normal dianggap melanggar norma ditafsirkan secara berbeda. Ketika suatu tindakan dikaitkan dengan upaya mempertahankan kelompok, memulihkan keteraturan, atau menghadapi pihak yang dianggap mengancam, karakter dominan pemimpin dapat dipersepsikan lebih relevan. Dengan demikian, konteks ancaman dapat memperkuat penerimaan terhadap

pemimpin yang menunjukkan perilaku transgresif dan dominan.

Namun, hubungan antara ancaman dan preferensi terhadap pemimpin dominan bersifat kontekstual, bukan universal. Pengaruhnya bergantung pada jenis ancaman, posisi pengamat, serta persepsi mengenai kemampuan dan risiko yang ditimbulkan oleh pemimpin. Jika pemimpin sendiri dipandang sebagai sumber eksploitasi atau ancaman, preferensi terhadap dominasi justru dapat berkurang.

Secara keseluruhan, ketiga mekanisme yang telah dibahas—elastisitas penilaian moral, pelanggaran norma sebagai sinyal kekuasaan, serta kondisi ancaman dan konflik—saling berinteraksi dalam menjelaskan daya tarik pemimpin transgresif. Fleksibilitas moral memungkinkan pelanggaran dinilai lebih lunak ketika dianggap sesuai dengan nilai atau kepentingan kelompok. Pelanggaran tersebut kemudian dapat dipersepsikan sebagai sinyal kekuasaan dan dominasi. Ketika masyarakat berada dalam kondisi konflik, ancaman, atau ketidakpastian, karakter dominan menjadi semakin relevan sehingga dapat memperkuat daya tarik pemimpin transgresif.

Dengan demikian, daya tarik pemimpin transgresif tidak hanya berkaitan dengan tindakan pemimpin, tetapi juga dengan cara tindakan tersebut ditafsirkan dan kondisi sosial tempat penilaian berlangsung. Pelanggaran norma lebih mungkin memperoleh toleransi ketika dianggap memberikan manfaat, menunjukkan kekuasaan, dan sesuai dengan kebutuhan kelompok dalam menghadapi ancaman atau konflik.

### **Keterbatasan Moralisisasi sebagai Strategi Menghadapi Pemimpin Transgresi**

Moralisisasi, yaitu penekanan berulang terhadap kesalahan moral dan pelanggaran norma seorang pemimpin, memiliki keterbatasan dalam mengubah dukungan terhadap pemimpin transgresif. Keterbatasan tersebut muncul karena respons masyarakat terhadap pelanggaran norma tidak selalu berupa penolakan. Penilaian moral dipengaruhi oleh nilai, identitas, kepentingan, dan tujuan pengamat, sehingga suatu tindakan dapat dipandang sebagai pelanggaran serius oleh satu kelompok tetapi ditafsirkan berbeda oleh kelompok lain.

Pelanggaran norma juga dapat berfungsi sebagai sinyal kekuasaan dan dominasi. Ketika tindakan transgresif dipersepsikan memberikan manfaat bagi kelompok pendukung, perhatian pengamat tidak hanya tertuju pada pelanggaran, tetapi juga pada manfaat yang dianggap dihasilkan, keberanian yang ditampilkan, dan kemampuan pemimpin untuk bertindak tanpa terlalu dibatasi aturan. Dalam kondisi demikian, kecaman yang hanya menekankan karakter buruk atau ketidakbermoralan pemimpin belum tentu menyentuh faktor yang membuat perilaku transgresif tetap menarik bagi pendukung.

Efektivitas moralisisasi menjadi semakin terbatas ketika masyarakat berada dalam kondisi konflik, ancaman, atau ketidakpastian. Dalam situasi tersebut, karakter seperti ketegasan, kekuatan, dan kemampuan menghadapi konflik dapat memperoleh bobot yang lebih besar. Akibatnya, kepatuhan terhadap norma dapat dipandang kurang penting dibandingkan persepsi mengenai kemampuan pemimpin dalam melindungi atau mencapai kepentingan kelompok.

Meskipun demikian, keterbatasan moralisisasi tidak berarti bahwa kecaman moral selalu tidak berguna. Respons terhadap pelanggaran norma bergantung pada konteks, jenis pelanggaran, norma yang dilanggar, identitas pengamat, dan cara tindakan tersebut dipersepsikan. Kecaman moral tetap dapat berperan dalam mempertahankan norma ketika masyarakat menganggap suatu pelanggaran mengancam tatanan yang penting. Persoalannya adalah bahwa kecaman moral semata belum tentu cukup untuk mengubah mekanisme psikologis yang membuat pemimpin transgresif tetap memperoleh dukungan.

Karena itu, pendekatan terhadap pemimpin transgresif perlu melampaui sekadar pengulangan bahwa suatu tindakan salah atau melanggar norma. Perhatian juga perlu diarahkan pada klaim manfaat dan ancaman yang mendasari penerimaan terhadap tindakan tersebut. Hal ini mencakup pengujian apakah manfaat yang dijanjikan benar-benar terwujud, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta apakah tujuan yang sama dapat dicapai

melalui cara yang tidak melanggar norma. Pendekatan tersebut tetap mempertahankan dimensi moral, tetapi melengkapinya dengan evaluasi terhadap konsekuensi nyata dari tindakan pemimpin.

Dengan demikian, keterbatasan moralisasi bukan terletak pada tidak pentingnya norma moral, melainkan pada asumsi bahwa penyebutan suatu pelanggaran moral secara otomatis akan mengubah persepsi pendukung. Elastisitas penilaian moral, persepsi pelanggaran sebagai sinyal kekuasaan, serta kondisi ancaman dan konflik dapat membuat suatu tindakan transgresif tetap diterima. Oleh sebab itu, pendekatan yang lebih komprehensif perlu menggabungkan penegasan norma dengan pengujian terhadap konsekuensi nyata, klaim manfaat, dan narasi ancaman yang digunakan untuk memberikan makna positif terhadap perilaku transgresif.

### **Strategi Meredam Daya Tarik Pemimpin Transgresif**

Strategi untuk menghadapi daya tarik pemimpin transgresif perlu diarahkan pada mekanisme psikologis yang membuat pelanggaran norma dapat diterima, terutama persepsi mengenai manfaat, narasi ancaman, dan anggapan bahwa dominasi diperlukan dalam kepemimpinan. Pendekatan ini tidak mengabaikan dimensi moral, tetapi melengkapinya dengan pengujian terhadap klaim dan persepsi yang mendasari penerimaan terhadap perilaku transgresif.

Strategi pertama adalah menguji klaim mengenai manfaat dari pelanggaran norma. Ketika suatu tindakan transgresif dipersepsikan memberikan keuntungan bagi kelompok pendukung, pelanggaran tersebut dapat memperoleh toleransi. Oleh karena itu, evaluasi perlu diarahkan pada konsekuensi nyata dari tindakan pemimpin dengan membandingkan klaim yang disampaikan dengan hasil yang dapat diverifikasi. Pertanyaan penting mencakup apakah manfaat benar-benar terjadi, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, serta apakah manfaat tersebut bersifat jangka pendek atau berkelanjutan. Pendekatan ini menggeser perhatian dari sekadar penilaian karakter moral menuju hubungan antara klaim, tindakan, dan konsekuensi.

Strategi kedua adalah menguji secara kritis narasi mengenai ancaman dan kebutuhan terhadap dominasi. Karena persepsi ancaman dapat meningkatkan preferensi terhadap pemimpin dominan, perlu dibedakan antara ancaman yang memiliki dasar empiris dan ancaman yang dibesar-besarkan atau dibingkai secara selektif. Pengujian tersebut tidak berarti menyangkal ancaman yang nyata, tetapi menilai tingkat risiko, proporsionalitas tindakan yang ditawarkan, serta kemungkinan adanya alternatif penyelesaian. Dengan demikian, respons terhadap narasi ancaman sebaiknya didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi dan penilaian risiko yang proporsional.

Strategi ketiga adalah membedakan ketegasan kepemimpinan dari pelanggaran norma. Pelanggaran aturan dapat dipersepsikan sebagai tanda keberanian dan kemampuan bertindak, sehingga kepatuhan terhadap norma berisiko disalahartikan sebagai kelemahan. Karena itu, penting menunjukkan bahwa pemimpin dapat mengambil keputusan, menghadapi konflik, dan melindungi kepentingan masyarakat secara tegas tanpa mengabaikan batas hukum dan etika. Dengan cara ini, kepemimpinan berbasis aturan tidak diposisikan sebagai kebalikan dari ketegasan.

Ketiga strategi tersebut saling melengkapi. Pengujian klaim manfaat berfokus pada apakah transgresi benar-benar menghasilkan keuntungan, pengujian narasi ancaman berfokus pada apakah dominasi memang diperlukan untuk menghadapi risiko, sedangkan pembedaan antara ketegasan dan pelanggaran norma berfokus pada apakah kepemimpinan efektif harus dilakukan dengan melampaui aturan. Kerangka ini lebih luas daripada sekadar mengulang kecaman moral terhadap pemimpin transgresif.

Namun, strategi tersebut masih merupakan implikasi konseptual dari sintesis literatur, bukan intervensi yang telah terbukti efektif melalui pengujian lapangan. Efektivitasnya dapat bergantung pada konteks politik, karakter kelompok pendukung, jenis pelanggaran, tingkat ancaman yang dirasakan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi. Oleh karena itu, penelitian empiris lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah dan dalam kondisi apa

strategi tersebut dapat mengubah persepsi terhadap pemimpin transgresif.

### **Relevansi bagi Konteks Indonesia**

Kajian mengenai daya tarik pemimpin transgresif relevan untuk memahami dinamika kepemimpinan dan perilaku politik di Indonesia. Dalam konteks demokrasi Indonesia, penilaian terhadap kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan kelembagaan, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memahami moralitas, kekuasaan, identitas kelompok, kepentingan, serta kondisi konflik dan ancaman. Karena itu, toleransi terhadap perilaku pemimpin yang melanggar norma tidak dapat langsung dipahami sebagai rendahnya kesadaran moral, melainkan perlu dilihat dari cara kelompok pendukung menafsirkan tindakan tersebut.

Konsep *living law* dari Eugen Ehrlich memberikan kerangka sosiologis untuk memahami proses tersebut. Hukum tidak hanya bekerja melalui aturan formal dan sanksi negara, tetapi juga melalui norma, kebiasaan, praktik, dan pola hubungan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks pemimpin transgresif, dapat muncul perbedaan antara norma hukum formal dan norma yang berkembang dalam kelompok pendukung. Tindakan yang secara formal merupakan pelanggaran dapat memperoleh makna berbeda ketika dipandang melalui ikatan sosial, nilai, identitas, atau kepentingan kelompok.

Legitimasi sosial menjadi unsur penting dalam proses tersebut. Pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dapat memengaruhi cara kelompok menafsirkan tindakan yang dilakukan. Pelanggaran norma formal dapat dimaknai sebagai strategi kepemimpinan, tindakan yang dianggap memiliki alasan tertentu, atau konsekuensi yang dapat ditoleransi demi kepentingan kelompok. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan toleransi sosial terhadap pelanggaran, yaitu ketika status normatif suatu tindakan tetap merupakan pelanggaran tetapi respons sosial terhadapnya menjadi lebih permisif. Sebaliknya, ketika legitimasi pemimpin melemah, pembenaran tersebut dapat kehilangan daya ikat sehingga pelanggaran kembali dipandang sebagai tindakan yang patut dipersoalkan.

Data mengenai integritas masyarakat, seperti Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang dicatat KPK, menunjukkan bahwa permisivitas terhadap praktik koruptif tertentu masih relevan untuk dikaji. Namun, data tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum menerima korupsi atau perilaku transgresif pemimpin. Temuan tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikasi bahwa respons sosial terhadap pelanggaran masih dipengaruhi oleh konteks dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Kerangka psikologi sosial dalam kajian ini memperluas analisis tersebut melalui tiga mekanisme utama: persepsi manfaat bagi kelompok, pelanggaran sebagai sinyal kekuasaan atau dominasi, serta kondisi ancaman dan konflik. Ketika suatu tindakan dipersepsikan menguntungkan kelompok, penilaian terhadapnya dapat menjadi lebih lunak. Ketika pelanggaran dipahami sebagai tanda keberanian atau kekuasaan, tindakan tersebut dapat memperoleh makna selain sebagai penyimpangan moral. Sementara itu, dalam kondisi yang dipersepsikan penuh ancaman atau konflik, karakter dominan dapat memperoleh relevansi yang lebih besar. Ketiga mekanisme tersebut dapat menjadi dasar penelitian empiris mengenai penerimaan masyarakat Indonesia terhadap perilaku pemimpin yang melanggar norma.

Implikasinya juga relevan bagi pendidikan Islam dan literasi media. Nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah dapat menjadi landasan normatif untuk membedakan kepemimpinan yang tegas dari kepemimpinan yang menggunakan pelanggaran norma sebagai sumber legitimasi. Namun, pendidikan moral perlu dilengkapi dengan kemampuan memahami pengaruh identitas, kepentingan, emosi, tekanan kelompok, dan persepsi ancaman terhadap penilaian politik. Demikian pula, media massa dan jurnalisme digital dapat berperan dengan tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran, tetapi juga menguji klaim manfaat, distribusi biaya dan manfaat, bukti mengenai ancaman, serta konsekuensi nyata dari kebijakan pemimpin.

Dengan demikian, relevansi kajian ini bagi Indonesia terutama terletak pada penyediaan kerangka psikologis dan sosiologis untuk memahami pembentukan dukungan terhadap perilaku

transgresif, bukan pada penerapan strategi politik tertentu. Kerangka ini dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara moralitas, identitas kelompok, persepsi manfaat, ancaman, dominasi, legitimasi sosial, dan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan dalam konteks Indonesia.

## CONCLUSION

Kajian ini menunjukkan bahwa daya tarik pemimpin transgresif tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui anggapan bahwa masyarakat mengabaikan atau tidak memahami norma moral. Dukungan terhadap pemimpin yang melakukan pelanggaran norma dapat terbentuk melalui mekanisme psikologis yang membuat tindakan transgresif ditafsirkan secara berbeda oleh pengamat. Berdasarkan sintesis literatur psikologi sosial dan psikologi politik, terdapat tiga mekanisme utama yang saling berkaitan dalam menjelaskan fenomena tersebut.

Pertama, penilaian moral bersifat kontekstual dan dapat berubah sesuai dengan identitas kelompok, kepentingan, serta tujuan yang sedang dihadapi individu. Suatu tindakan yang dipandang tidak dapat diterima dalam satu konteks belum tentu memperoleh penilaian yang sama dalam konteks lain. Ketika tindakan seorang pemimpin dipersepsikan memberikan manfaat kepada kelompok tertentu atau dianggap sejalan dengan nilai dan kepentingan pendukungnya, pelanggaran norma dapat memperoleh toleransi yang lebih besar. Dengan demikian, penerimaan terhadap pemimpin transgresif tidak selalu menunjukkan penolakan terhadap moralitas, tetapi dapat mencerminkan perbedaan dalam menentukan norma mana yang dianggap paling relevan dan kepentingan mana yang diprioritaskan.

Kedua, pelanggaran norma dalam kondisi tertentu dapat berfungsi sebagai sinyal kekuasaan dan dominasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa individu yang melanggar norma dapat dipersepsikan memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk bertindak tanpa terlalu terikat oleh batasan yang berlaku. Persepsi tersebut dapat semakin kuat ketika pelanggaran dipandang memberikan manfaat kepada kelompok tertentu. Namun, efek pelanggaran norma sebagai sinyal kekuasaan tidak bersifat universal karena dipengaruhi oleh jenis norma yang dilanggar, posisi sosial pelaku dan pengamat, konteks budaya, serta konsekuensi tindakan bagi kelompok yang bersangkutan.

Ketiga, kondisi ancaman dan konflik dapat meningkatkan preferensi terhadap kepemimpinan yang dominan. Ketika individu mempersepsikan lingkungan sosial sebagai penuh ancaman, persaingan, atau ketidakpastian, karakter dominan dapat dianggap lebih relevan untuk menghadapi situasi tersebut. Dalam kondisi demikian, perilaku yang sebelumnya dipandang sebagai pelanggaran norma dapat ditafsirkan sebagai ketegasan atau keberanian. Meskipun demikian, hubungan antara ancaman dan preferensi terhadap pemimpin dominan juga bersifat kondisional. Jenis ancaman, sumber risiko, serta kemungkinan bahwa pemimpin sendiri melakukan eksploitasi terhadap kelompok dapat memengaruhi penerimaan terhadap kepemimpinan dominan.

Ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa daya tarik pemimpin transgresif terbentuk melalui interaksi antara penilaian moral, persepsi manfaat, persepsi kekuasaan, identitas kelompok, serta kondisi sosial yang ditandai oleh konflik dan ancaman. Oleh karena itu, kecaman moral semata memiliki keterbatasan sebagai pendekatan untuk menghadapi fenomena tersebut. Kecaman terhadap pelanggaran tetap penting untuk mempertahankan norma, tetapi perlu dilengkapi dengan upaya menguji klaim manfaat yang melekat pada tindakan transgresif, memeriksa konsekuensi nyata dari kebijakan atau tindakan pemimpin, serta menguji secara kritis narasi mengenai ancaman yang digunakan untuk membenarkan dominasi.

Secara konseptual, terdapat tiga pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk menghadapi daya tarik pemimpin transgresif. Pertama, membandingkan klaim manfaat yang disampaikan pemimpin dengan bukti mengenai dampak nyata kebijakan atau tindakannya. Kedua, membedakan ancaman yang memiliki dasar empiris dari ancaman yang diperbesar atau

dibingkai secara selektif untuk membangun dukungan terhadap tindakan luar biasa. Ketiga, membedakan ketegasan kepemimpinan dari pelanggaran norma dengan menunjukkan bahwa kemampuan mengambil keputusan, menghadapi konflik, dan menyelesaikan persoalan tidak harus diwujudkan melalui tindakan yang melampaui batas hukum dan etika. Ketiga pendekatan tersebut merupakan implikasi konseptual dari literatur yang dikaji dan belum dapat dipandang sebagai strategi yang telah terbukti efektif melalui pengujian empiris.

Dalam konteks Indonesia, kerangka ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian mengenai hubungan antara moralitas, kekuasaan, identitas kelompok, persepsi ancaman, dan perilaku politik. Perspektif tersebut juga memiliki relevansi bagi pendidikan Islam dan literasi media karena penguatan nilai moral perlu disertai kemampuan untuk mengevaluasi klaim, memeriksa bukti, memahami konsekuensi kebijakan, serta mengenali bagaimana identitas kelompok dan persepsi ancaman dapat memengaruhi penilaian terhadap pemimpin. Dengan demikian, penguatan literasi moral dan politik tidak diarahkan untuk menentukan pilihan politik masyarakat, tetapi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai informasi dan perilaku kepemimpinan secara lebih kritis.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada penggunaan metode kepustakaan sehingga strategi yang dirumuskan belum diuji secara langsung dalam konteks empiris, khususnya di Indonesia. Selain itu, sebagian besar temuan yang menjadi dasar analisis berasal dari penelitian psikologi sosial dan politik dalam konteks negara yang berbeda sehingga penerapannya pada masyarakat Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya dapat menguji mekanisme tersebut melalui survei, eksperimen, wawancara, atau analisis isi media dengan mempertimbangkan karakteristik budaya, identitas kelompok, jenis pelanggaran norma, serta bentuk ancaman yang berkembang dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, kajian mengenai pemimpin transgresif dapat berkembang dari pemahaman konseptual menuju pengujian empiris mengenai kondisi yang membuat pelanggaran norma diterima, ditolak, atau bahkan dipersepsikan sebagai sumber legitimasi kepemimpinan.

## BIBLIOGRAPHY

- Adinugroho, I. (2016). Demokrasi, kepemimpinan, dan psikologi moral. *Buletin Psikologi*, 24(2), 76–86. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.18067>
- Bøggild, T., & Laustsen, L. (2016). An intra-group perspective on leader preferences: Different risks of exploitation shape preferences for leader facial dominance. *The Leadership Quarterly*, 27(6), 820–837. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.09.003>
- Bocian, K., & Wojciszke, B. (2014). Self-interest bias in moral judgments of others' actions. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 40(7), 898–909. <https://doi.org/10.1177/0146167214529800>
- Graham, J., Haidt, J., & Nosek, B. A. (2009). Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 96(5), 1029–1046. <https://doi.org/10.1037/a0015141>
- Laustsen, L., & Petersen, M. B. (2017). Perceived conflict and leader dominance: Individual and contextual factors behind preferences for dominant leaders. *Political Psychology*, 38(6), 1083–1101. <https://doi.org/10.1111/pops.12403>
- Laustsen, L., Sheng, X., Ahmad, M. G., Al-Shawaf, L., Banai, B., Banai, I. P., & van Vugt, M. (2025). Cross-cultural evidence that intergroup conflict heightens preferences for dominant leaders: A 25-country study. *Evolution and Human Behavior*, 46(3), Article 106674. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2025.106674>
- Melnikoff, D. E., & Bailey, A. H. (2018). Preferences for moral vs. immoral traits in others are conditional. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(3), E592–E600. <https://doi.org/10.1073/pnas.1714945115>
- Petersen, M. B., & Laustsen, L. (2020). Dominant leaders and the political psychology of

- followership. *Current Opinion in Psychology*, 33, 136–141. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.07.005>
- Popa, M., Phillips, B. J., & Robertson, C. (2014). Positive outcomes of social norm transgressions. *Journal of Consumer Behaviour*, 13(5), 351–363. <https://doi.org/10.1002/cb.1483>
- Stamkou, E., Homan, A. C., & Van Kleef, G. A. (2020). Climbing the ladder or falling from grace? A threat-opportunity framework of the effects of norm violations on social rank. *Current Opinion in Psychology*, 33, 74–79. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.07.012>
- Stamkou, E., Van Kleef, G. A., Homan, A. C., & Galinsky, A. D. (2016). How norm violations shape social hierarchies: Those who stand on top block norm violators from rising up. *Group Processes & Intergroup Relations*, 19(5), 608–629. <https://doi.org/10.1177/1368430216641305>
- Stamkou, E., Van Kleef, G. A., Homan, A. C., Gelfand, M. J., van de Vijver, F. J. R., van Egmond, M. C., Boer, D., Phiri, N., Ayub, N., Kinias, Z., Cantarero, K., Efrat-Treister, D., Figueiredo, A., Hashimoto, H., Hofmann, E. B., Lima, R. P., & Lee, I.-C. (2019). Cultural collectivism and tightness moderate responses to norm violators: Effects on power perception, moral emotions, and leader support. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 45(6), 947–964. <https://doi.org/10.1177/0146167218802832>
- Stenner, K. (2005). *The authoritarian dynamic*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511614712>
- Travaglino, G. A., Abrams, D., Randsley de Moura, G., & Yetkili, O. (2016). Fewer but better: Proportionate size of the group affects evaluation of transgressive leaders. *British Journal of Social Psychology*, 55(2), 318–336. <https://doi.org/10.1111/bjso.12125>
- Van Kleef, G. A. (2025). Understanding (and counteracting) the appeal of transgressive leaders. *Trends in Cognitive Sciences*, 29(6), 495–498. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2025.04.006>
- Van Kleef, G. A., Homan, A. C., Finkenauer, C., Blaker, N. M., & Heerdink, M. W. (2012). Prosocial norm violations fuel power affordance. *Journal of Experimental Social Psychology*, 48(4), 937–942. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2012.02.022>
- Van Kleef, G. A., Homan, A. C., Finkenauer, C., Gündemir, S., & Stamkou, E. (2011). Breaking the rules to rise to power: How norm violators gain power in the eyes of others. *Social Psychological and Personality Science*, 2(5), 500–507. <https://doi.org/10.1177/1948550611398416>
- Van Kleef, G. A., Homan, A. C., Stamkou, E., Karinen, A. K., & Gelfand, M. J. (2026). Social consequences of counternormative behavior: The violation appraisal response (VAR) model. *Advances in Experimental Social Psychology*. Advance online publication.
- Van Kleef, G. A., Wanders, F., Stamkou, E., & Homan, A. C. (2015). The social dynamics of breaking the rules: Antecedents and consequences of norm-violating behavior. *Current Opinion in Psychology*, 6, 25–31. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.03.013>
- Van Kleef, G. A., Wanders, F., van Vianen, A. E. M., Dunham, R. L., Du, X., & Homan, A. C. (2023). Rebels with a cause? How norm violations shape dominance, prestige, and influence granting. *PLOS ONE*, 18(11), Article e0294019. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294019>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan* (Cet. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.